



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I

2023



Kata Pengantar

Inspektorat Wilayah I berhasil mencapai NCKO 107,51 dengan realisasi anggaran sebesar

Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 ini merupakan bagian dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dilakukan Inspektorat Wilayah I selama tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LKj) tahunan. Kewajiban ini dipertegas kembali melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.

Dalam kerangka organisasi Kementerian Luar Negeri, LKj Inspektorat Wilayah I tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia. LKj ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang berhasil dicapai dalam tahun anggaran, sesuai pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Jenderal. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024.

Merujuk Realisasi Rencana Aksi (Renaksi) TA 2023, Inspektorat Wilayah I telah berhasil melaksanakan Program Dukungan Manajemen untuk kegiatan Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 mencakup antara lain pelaksanaan Audit, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA-K/L, Reviu RKBMN, Reviu LKj, Evaluasi AKIP, dan kegiatan pengawasan lainnya seperti pendampingan kegiatan KTT ASEAN 2023, pendampingan Satker, kunjungan kerja dalam rangka permintaan keterangan/klarifikasi atas laporan pengaduan yang disampaikan kepada Itjen serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Inspektorat Wilayah I. Khusus untuk kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu RKA-K/L, pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah I ditetapkan sebagai koordinator kegiatan dimaksud. Selain itu, pada tahun 2023 Inspektorat Wilayah I juga mendapatkan tugas untuk melakukan Reviu

Perubahan Anggaran, Reviu Pengadaan Barang dan Jasa serta koordinator dalam pelaksanaan Telah Sejawat Intern (TSI).

Dalam kaitan dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan RI), selama tahun 2023 juga telah dilakukan upaya penyelesaian hutang pihak ketiga berupa PK minus Perwakilan RI di Luar Negeri dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan lainnya, melalui koordinasi intensif dengan unit kerja dan instansi terkait. Upaya serupa juga dilakukan untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern (Inspektorat Jenderal).

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati, Inspektorat Wilayah I memperoleh alokasi pagu anggaran untuk Program Dukungan Manajemen kegiatan Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), sebesar . Dari total alokasi anggaran di tahun 2023 tersebut, realisasi anggaran Inspektorat Wilayah I mencapai sebesar atau . Sementara itu Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) di tahun 2023 adalah sebesar 107,51.

Selama TA 2023, Inspektorat Wilayah I menjadi koordinator kegiatan Penyusunan Kriteria Audit Kinerja Diplomasi Ekonomi, Reviu LK, PIPK, Evaluasi AKIP, Bimtek dan Reviu RKA-K/L, dan Telaah Sejawat Internal

Dalam mencapai target kinerja tahun 2023, Inspektorat Wilayah I mengalami tantangan seperti jadwal pengawasan atas permintaan Satker lain yang bertabrakan dengan jadwal pengawasan lainnya, adanya aturan-aturan baru yang mempengaruhi pengawasan, dan kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Inspektorat Wilayah I terus meningkatkan koordinasi dengan Satker terkait guna mengatur jadwal dan sumber daya yang ada, agar pengawasan tetap dapat dilakukan. Inspektorat Wilayah I juga terus aktif berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis terkait aturan-aturan baru maupun upaya pemutakhiran aturan yang ada di Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Wilayah I juga telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja pengawasan di Kementerian Luar Negeri dengan mengoordinasi kegiatan Telaah Sejawat Internal antar Inspektorat Wilayah, serta berperan aktif dalam penilaian *Internal Audit Capability Model* (IACM) Inspektorat Jenderal. Telaah Sejawat Internal diharapkan dapat dilakukan secara berkala untuk mewujudkan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Kemenlu dan menjadi program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas/ *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) APIP.

Kami berharap LKj ini, disamping menjadi media pertanggungjawaban publik terkait kinerja, juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan umpan balik bagi Inspektorat Wilayah I untuk

mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Inspektorat Wilayah I juga akan terus berupaya untuk memberikan nilai manfaat bagi organisasi Kementerian Luar Negeri dan memberikan manfaat bagi negara Republik Indonesia.

Jakarta, 17 Januari 2024
Inspektur Wilayah I

Albert Abdi

Executive Summary

Sebagai bagian dari organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan, Inspektorat Wilayah I melaksanakan tugas-tugas pengawasan, pendampingan dan konsultasi pembinaan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, khususnya pada Satker/Unit Kerja yang berada di wilayah kerjanya, yakni Ditjen Aspasaf, Ditjen Kerja Sama ASEAN, BSKLN dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Perwakilan di Wilayah Asia. Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Wilayah I memuat analisis capaian kinerja di tahun anggaran 2023 sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Wilayah I Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Wilayah I, capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 (NCKO) adalah sebesar 107,51 dengan realisasi anggaran 100,00%. Nilai capaian kinerja tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 103,42 di tahun 2022 dan sebesar 103,02 di tahun 2021. Capaian Kinerja tahun 2023 terbentuk dari perspektif-perspektif berikut:

- *Customer Perspective* sebesar 109,00;
- *Internal Business Process Perspective* sebesar 112,77;
- *Learning & Growth Perspective* sebesar 100,25.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Wilayah I dalam upaya pencapaian kinerja antara lain: Audit Luar Negeri pada KBRI Tokyo dan KJRI Kota Kinabalu, Audit Dalam Negeri pada Pusat SK IKAD dan Direktorat Pasifik dan Oseania, Pendampingan rangkaian kegiatan KTT ASEAN, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA K/L, Evaluasi AKIP, Reviu RKBMN, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit APIP maupun pemeriksaan BPK. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Wilayah I juga melakukan asistensi dan konsultasi kepada Satker untuk mengurangi risiko permasalahan yang mungkin terjadi di satker baik Pusat maupun Perwakilan RI.

**Peningkatan
Nilai Capaian
Inspektorat Wilayah I
TA 2021 s.d. 2023**



Pada TA 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri telah berupaya meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan dengan berbagai kegiatan yang ada. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya peran Inspektorat Wilayah I sebagai koordinator pada kegiatan Telaah Sejawat Internal antar Inspektorat Wilayah, yang menjadi bentuk *quality assurance* pada kegiatan pengawasan yang telah dilakukan masing-masing Inspektorat Wilayah. Selain

itu, Inspektorat Wilayah I juga berkontribusi sebagai koordinator dalam penyusunan Kepirjen terkait kriteria audit untuk Diplomasi Ekonomi yang merupakan tindak lanjut temuan BPK, serta upaya peningkatan efektivitas pengawasan kinerja Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri. Di tahun 2023 Inspektorat Wilayah I juga ikut berperan aktif dalam kegiatan penilaian *Internal Audit Capability Model* (IACM) serta penyusunan Kepirjen terkait Evaluasi AKIP yang menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung kinerja Inspektorat Jenderal dalam peningkatan kualitas pengawasannya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Luar Negeri.

Kedepannya, Inspektorat Wilayah I akan terus berusaha meningkatkan kinerja yang telah dibangun dan berkontribusi aktif dalam peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Jenderal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di Inspektorat Wilayah I dan pengoptimalisasian anggaran yang telah dialokasikan.

Ikhtisar Capaian Kinerja TA 2023

NCKO: 107,51

C1.1

Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah I

109,00%

B.1.1

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

120,00%

B2.1

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil revidi dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

100,00%

B2.2

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

102,97%

B2.3

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

113,68%

L1.1

Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I

100,25%





Highlight Kinerja

Audit

**Audit Kinerja
KJRI Kota Kinabalu
Audit Kinerja KBRI Tokyo
Audit Kinerja Pusat
SK IKAD
Audit Kinerja Dit. Pasos**

Pendampingan

**Pendampingan KTT ASEAN
Asistensi Satker Pusat & Perwakilan**

Koordinator Kegiatan

**Penyusunan Kriteria Audit Kinerja Diplomasi Ekonomi
Reviu LK TA 2022
Reviu PIPK
Evaluasi AKIP
Bimtek & Reviu RKA-K/L
Telaah Sejawat Internal**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tugas dan Fungsi.....	1
I.3. Struktur Organisasi.....	2
I.4. Aspek Strategis	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
II.1. Rencana Strategis.....	5
II.2. Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
III.1. Capaian Kinerja.....	8
III.2. Realisasi Anggaran	46
III.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
BAB IV PENUTUP.....	49
IV.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja.....	49
IV.2. Kendala dan Tantangan	49
IV.3. Proyeksi Ke Depan.....	50

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel II. 1 Target IKU Inspektorat Wilayah I TA 2023.....	6
Tabel III. 1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I TA 2023	8
Tabel III. 2 Perhitungan Capaian Kinerja IKU C1.1 Inspektorat Wilayah I TA 2023	12
Tabel III. 3 Perbandingan Kinerja IKU C1.1 Inspektorat Wilayah I 2020-2023.....	13
Tabel III. 4 Perhitungan Capaian Kinerja IKU B1.1 Inspektorat Wilayah I TA 2023	20
Tabel III. 5 Perbandingan Kinerja IKU B1.1 Inspektorat Wilayah I 2020-2023	21
Tabel III. 6 Hasil Evaluasi AKIP TA 2022	22
Tabel III. 7 Perhitungan Capaian Kinerja IKU B2.1 Inspektorat Wilayah I TA 2023	27
Tabel III. 8 Perbandingan Kinerja IKU B2.1 Inspektorat Wilayah I 2020-2023	27
Tabel III. 9 Perhitungan Capaian Kinerja IKU B2.2 Inspektorat Wilayah I TA 2023	32
Tabel III. 10 Perbandingan Kinerja IKU B2.2 Inspektorat Wilayah I 2020-2023	33
Tabel III. 11 Perhitungan Capaian Kinerja IKU B2.3 Inspektorat Wilayah I TA 2023	37
Tabel III. 12 Perbandingan Kinerja IKU B2.3 Inspektorat Wilayah I 2020-2023	38
Tabel III. 13 Perhitungan Capaian Kinerja IKU L1.1 Inspektorat Wilayah I TA 2023.....	42
Tabel III. 14 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I TA 2022.....	42
Tabel III. 15 Perbandingan Kinerja IKU L1.1 Inspektorat Wilayah I 2020-2023	43
Tabel III. 16 Realisasi Pagu Anggaran TA 2023.....	46
Tabel III. 17 Data Output dan Anggaran Inspektorat Wilayah I TA 2023	47
Tabel III. 18 Formasi dan <i>Bezetting</i> Pegawai Inspektorat Wilayah I	48

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I TA 2023	2
Gambar II. 1 Visi Misi Kemenlu, Visi Misi Itjen dan Sasaran Strategis & IKU Itwil I	6
Gambar III. 1 Dashborad Survei Persepsi Inspektorat Jenderal TA 2023.....	12
Gambar III. 2 Audit Kinerja Perwakilan RI di Tokyo, 6 s.d. 11 Juni 2023	14
Gambar III. 3 Audit Kinerja di Perwakilan RI di Kota Kinabalu, 22 s.d.28 Mei 2023.....	15
Gambar III. 4 Pendampingan KTT ASEAN di Jakarta, 2 s.d. 5 September 2023.....	15
Gambar III. 5 Evaluasi AKIP TA 2022, 12 April s.d. 31 Mei 2023	16
Gambar III. 6 Klarifikasi Evaluasi AKIP TA 2022, 31 Mei 2023.....	21
Gambar III. 7 Reviu Laporan Keuangan TA 2022, 13 s.d. 26 Februari 2023	28
Gambar III. 8 Reviu PIPK, 13 s.d. 20 Februari 2023	29
Gambar III. 9 Reviu RKA K/L (alokasi anggaran), 9 s.d. 13 Oktober 2023	29
Gambar III. 10 Aplikasi SIPIK Inspektorat Jenderal.....	34
Gambar III. 11 Penyusunan Kepirjen terkait Kriteria Audit Kinerja Diplomasi Ekonomi, 7 s.d. 9 Agustus 2023	39
Gambar III. 12 Wawancara Telaah Sejawat Internal ke Inspektorat Wilayah II, 15 Desember 2023.....	44
Gambar III. 13 Diagram Perbandingan Realisasi Pagu Anggaran 2022 dan 2023	46



Bab I Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran. LKj Inspektorat Wilayah I Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Laporan Kinerja berisi hasil pengukuran kinerja selama tahun anggaran berjalan beserta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LKj disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia.

LKj Inspektorat Wilayah I Tahun 2023 disusun berdasarkan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC), yang terdiri dari 3 (tiga) perspektif yaitu *Customer Perspective*; *Internal Business Process*; dan *Learning and Growth*.

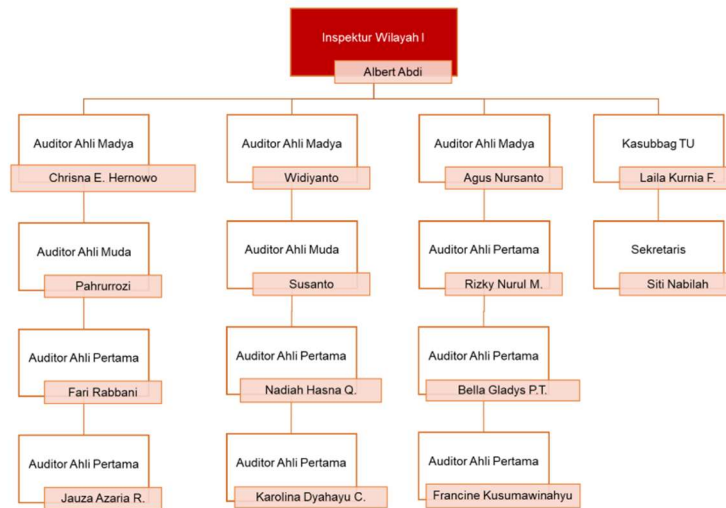
I.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri pasal 568 dan 569, Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri.

Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, serta unit organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri.

I.3. Struktur Organisasi

Sejak Januari 2023, Inspektorat Wilayah I dipimpin oleh Bapak Albert Abdi. Struktur organisasi Inspektorat Wilayah I selama tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar I. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I TA 2023

Pada TA 2023, terdapat pengangkatan dua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Jabatan Fungsional Auditor menjadi Auditor Ahli Pertama sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah I didukung oleh dua belas orang Fungsional Auditor (tiga orang Fungsional Auditor Ahli Madya, dua orang Fungsional Auditor Ahli Muda, dan tujuh orang Fungsional Auditor Ahli Pertama), dan satu orang Kepala Subbagian Tata Usaha. Selain itu Inspektorat Wilayah I juga memiliki dua Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bertugas sebagai Sekretaris dan Pengemudi.

Pada triwulan akhir tahun 2023, Inspektorat Wilayah I kehilangan dua orang auditor yaitu satu orang auditor madya (meninggal dunia) dan satu orang auditor muda (penugasan SK 111 ke KBRI Ankara). Hal ini tentunya mempengaruhi bobot pekerjaan untuk masing-masing pegawai, terutama mengingat jumlah auditor di Inspektorat Wilayah I pada dasarnya lebih kecil dibandingkan formasi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yaitu sebanyak 54 auditor.

I.4. Aspek Strategis

I.4.1. Peran Strategis

Aspek Strategis Organisasi Inspektorat Wilayah I tidak terlepas dari aspek internal dan aspek eksternal organisasi yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan intern yang dilakukan terhadap seluruh Satuan Kerja (Satker) Kemenlu di Pusat dan Perwakilan RI.

Sebagai bagian dari fungsi manajemen organisasi, pengawasan intern

merupakan fungsi manajemen yang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (dalam hal ini Kementerian). Peran penting pengawasan tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 548 dan pasal 569 Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Dalam rangka memperkuat pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kemenlu dan Perwakilan Republik Indonesia, Permenlu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, lahir sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sebagai bagian dari APIP Kemenlu, pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Wilayah I meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Dalam kaitan ini, kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Wilayah I sebagai bagian dari APIP juga memiliki peran strategis untuk melakukan pendampingan kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang diampu Kementerian Luar Negeri yaitu PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dan PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dalam kaitan ini, Inspektorat Wilayah I pada tahun 2023, telah berperan aktif dalam pendampingan kegiatan terkait Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 dan mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan diplomasi ekonomi, termasuk penyusunan kriteria audit kinerja diplomasi ekonomi di Perwakilan RI.

Sejalan dengan perubahan paradigma pengawasan, Inspektorat Wilayah I terus melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk meningkatkan peran aparat pengawas intern sesuai perubahan paradigma tersebut, yaitu sebagai pendeteksi dini (*early warning system*), konsultan dan memberikan kualitas keyakinan yang memadai (*quality assurance*) atas penyelenggaraan kegiatan Satker. Hal ini dilakukan dengan memberikan pendampingan dari tahap awal perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan yang dilakukan Satker Pusat maupun Perwakilan RI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tersebut, Inspektorat Wilayah I juga tidak terlepas dari kode etik dan standar APIP dimana auditor wajib mematuhi prinsip Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi.

Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

I.4.2. Permasalahan utama (*strategic issues*)

Dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Luar Negeri terdapat beberapa permasalahan utama antara lain:

- a. Belum optimalnya kegiatan peningkatan kompetensi auditor terutama bagi auditor yang baru bergabung;
- b. Terdapat regulasi-regulasi internal Inspektorat Jenderal yang belum dimutakhirkan dengan aturan terbaru di tingkat nasional;
- c. Belum optimalnya kegiatan penjaminan kualitas pengawasan di Inspektorat Jenderal; dan
- d. Banyaknya permintaan maupun kebutuhan pengawasan dari APIP namun terdapat keterbatasan sumber daya yang ada.

Bab II

Perencanaan Kinerja

II.1. Rencana Strategis

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah I merujuk pada Visi dan Misi Inspektorat Jenderal yang berpedoman pada Visi dan Misi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri (Kemenu).

Hal ini dapat diilustrasikan pada bagan dibawah ini:

Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri

Visi:

Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Misi:

Meningkatkan Infrastruktur diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia.



Visi dan Misi Inspektorat Jenderal

Visi:

Terwujudnya peran dan kapabilitas APIP yang efektif guna mendukung keberhasilan diplomasi untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Belandaskan Gotong Royong.

Misi:

- Meningkatkan Tata Kelola Pengawasan Intern berbasis risiko dan digitalisasi pengawasan.
- Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja.
- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan konsultasi dan pendampingan guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dan anggaran berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang akuntabel di Satuan Kerja melalui fungsi evaluasi selaku APIP.
- Meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengawasan intern dan ekstern.
- Mendorong penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai target Pemerintah dalam RPJM 2020-2024.





Sasaran Strategis dan IKU Inspektorat Wilayah I

Sasaran Strategis:

- Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel.
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri.
- Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan.
- Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah I yang Baik.

Indikator Kinerja Utama:

- Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah I
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I
- Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I

Gambar II. 1 Visi Misi Kemenlu, Visi Misi Itjen dan Sasaran Strategis & IKU Itwil I

II.2. Perjanjian Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Wilayah I Tahun Anggaran 2023, terdapat 4 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk menjalankan kegiatannya, Inspektorat Wilayah I mendapatkan pagu alokasi awal sebesar . Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu anggaran terakhir untuk Inspektorat Wilayah I menjadi sebesar . Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Wilayah I TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1 Target IKU Inspektorat Wilayah I TA 2023

Kode SS	Sasaran	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
Customer Perspective				
C1	Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel	C1.1	Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah I	3 (skala 4)
Internal Business Process Perspective				
B1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri	B1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	68%
B2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini terjadinya Risiko Permasalahan	B2.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	100%

Kode SS	Sasaran	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
		B2.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	95,50%
		B2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	87,50%
Learning & Growth Perspective				
L1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah I yang Baik	L1.1	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I	79,5 (BB)

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sebagai implementasi dari ketentuan Peraturan Presiden tersebut, Inspektorat Wilayah I telah melaksanakan program kegiatan yang diamanatkan dalam Perjanjian Kinerja sesuai target dan pengukuran kinerja (IKU) secara akuntabel berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

III.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran aspek kinerja untuk Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Wilayah I telah mencapai target sesuai yang direncanakan pada dokumen Perjanjian Kinerja dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) sebesar 107,51. Berikut rincian capaian kinerja pada masing-masing IKU:

Tabel III. 1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I TA 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
CUSTOMER PERSPECTIVE					
1.	Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel	Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah I	3 (Skala 4)	3,27	109,00%
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE					
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	68%	85,31%	125,45%* (batas toleransi 120%)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
	Dini terjadinya Risiko Permasalahan				
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	95,50%	98,33%	102,97%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	87,50%	99,47%	113,68%
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE					
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah I yang Baik	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I	79,50 (BB)	79,70 (BB)	100,25%

**Batas Toleransi Capaian maksimal 120%*

Dari capaian IKU di atas, Nilai kinerja Inspektorat Wilayah I untuk masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut:

- *Customer Perspective* (40%) sebesar 109,00;
- *Internal Business Process Perspective* (30%) sebesar 112,77; dan
- *Learning and Growth Perspective* (30%) sebesar 100,25.

Customer Perspective

109,00



Sasaran Strategis C1 **Terwujudnya Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel**

Meliputi 1 (satu) IKU yaitu:

C1.1

**Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan
intern oleh Inspektorat Wilayah I**

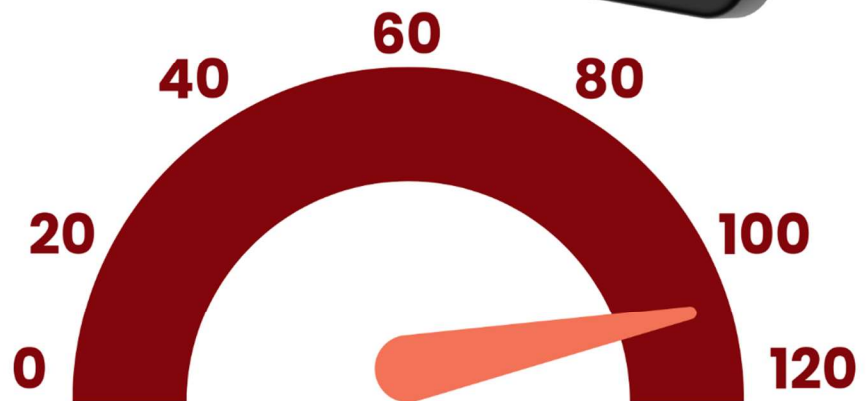
IKU C1.1

Indeks persepsi
**kepuasan layanan
pengawasan intern** oleh
Inspektorat Wilayah I



Realisasi 3,27
dari target 3 (skala 4)
Capaian: 109%

*Hasil survei terus
mengalami peningkatan
sejak TA 2021*



**Batas toleransi
capaian 120%**

Kenaikan hasil indeks survei dua tahun terakhir menunjukkan komitmen Inspektorat Wilayah I untuk terus **meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan** yang diberikan kepada penerima layanan guna memberikan **nilai tambah** dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan.

Satker Pusat &
Perwakilan

Audit

Pemantauan

Reviu

Evaluasi

**Kegiatan
Pengawasan
Lainnya**

LK, PIPK, RKBMN,
RKA-K/L, PAPBJ

AKIP

IKU C1.1 Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah I

Deskripsi IKU

Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern didapatkan dari hasil survei persepsi kepuasan yang disebarakan setelah pelaksanaan layanan pengawasan. Pelaksanaan survei didasarkan pada Kepirjen Nomor 00338/B/PW/05/2022/67/11 tentang Pedoman Survei Persepsi Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal. Layanan pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Wilayah I terdiri dari audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya. Responden yang dijadikan objek survei disesuaikan dengan keterlibatannya dalam lingkungan kegiatan pengawasan yang diberikan Inspektorat Jenderal.

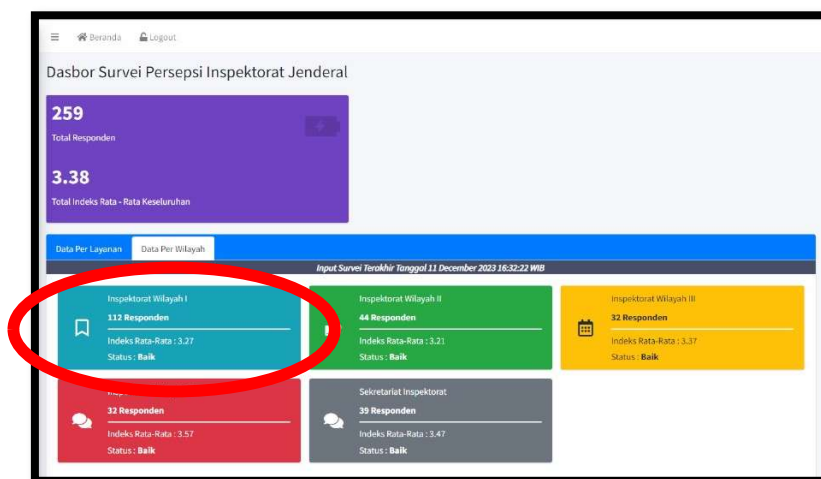
Untuk menghitung Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern atas kegiatan pengawasan yang telah dilakukan, Itwil I meminta kepada penerima layanan pengawasan untuk mengisi survei kepuasan yang dapat diakses pada tautan: <https://kem.lu/surveipersepsi23>.

Informasi Kinerja

Tabel III. 2 Perhitungan Capaian Kinerja IKU C1.1 Inspektorat Wilayah I TA 2023

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah I	Rata rata Indeks Kepuasan terhadap layanan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I	3,27
Realisasi		3,27
Target		3 (skala 4)
Capaian		109%

Pada tahun 2023, realisasi IKU C1.1 Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah I adalah sebesar 3,27 dari target sebesar 3. Dengan demikian capaian IKU C1.1 tersebut adalah sebesar 109%. Berdasarkan skala indeksasi IKU, nilai indeks persepsi tersebut masuk dalam kategori “Baik”.



Gambar III. 1 Dashborad Survei Persepsi Inspektorat Jenderal TA 2023

Perbandingan Kinerja

Daftar pertanyaan survei dan nomenklatur untuk IKU C1.1 telah beberapa kali mengalami penyesuaian untuk penyederhanaan dan ketepatan narasi pengukuran, tanpa merubah substansi pertanyaan utama survei. Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern untuk IKU C1.1 pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 maupun tahun 2022. Akan tetapi indeks persepsi kepuasan pada 3 tahun terakhir masih berada di bawah tahun 2020, sebagaimana ditunjukkan tabel perbandingan berikut:

Tabel III. 3 Perbandingan Kinerja IKU C1.1 Inspektorat Wilayah I 2020-2023

IKU C1.1	2020	2021	2022	2023
Indeks Persepsi Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah I (Realisasi)	3,54	3,00 ▼	3,07 ▲	3,27 ▲
Target	3 (skala 4)	3 (skala 4) —	3 (skala 4) —	3 (skala 4) —
Capaian (Realisasi ÷ Target)	118%	100% ▼	102,33% ▲	109,00% ▲

Selama 4 tahun terakhir indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah I selalu masuk dalam kategori Baik, selain itu terdapat kenaikan capaian pada 2 tahun terakhir yang disebabkan kenaikan hasil indeks survei. Kenaikan hasil indeks survei pada periode 2022 dan 2023 menunjukkan komitmen Inspektorat Wilayah I untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan yang diberikan kepada penerima layanan guna memberikan nilai tambah dari kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Jumlah responden survei untuk Indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern oleh Inspektorat Wilayah I mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya (2022). Pada periode tersebut jumlah responden survei meningkat dari 42 responden di tahun 2022 menjadi 112 responden di tahun 2023. Dengan demikian pada tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah responden survei sebanyak 70 orang dibandingkan tahun 2022 atau meningkat 166,67%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya Inspektorat Wilayah I dalam meningkatkan kesadaran para penerima layanan untuk berpartisipasi mengisi survei. Peningkatan jumlah responden yang signifikan tersebut juga membantu Inspektorat Wilayah I dalam mengevaluasi layanan pengawasan yang telah dilakukan.

Dibandingkan dengan Inspektorat Wilayah lain, indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern untuk Inspektorat Wilayah I masih lebih kecil dibandingkan dengan Inspektorat Wilayah III (3,37) maupun Inspektorat Wilayah IV (3,57). Namun demikian jumlah responden yang mengisi survei untuk Inspektorat Wilayah I merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan Inspektroat Wilayah lainnya. Jumlah responden yang tinggi ini menunjukkan tingginya partisipasi Satker/Unit Kerja untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kinerja kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Wilayah I, sebagai bahan perbaikan di tahun mendatang. Selain itu, peningkatan jumlah responden yang mengisi survei juga sejalan dengan peningkatan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Wilayah I dan permintaan layanan konsultasi/pendampingan dari Satker. Oleh karenanya, Inspektorat Wilayah I akan terus berusaha meningkatkan nilai tambah yang

diberikan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan ke depannya. Hal ini pada gilirannya diharapkan, dapat pula meningkatkan nilai indeks persepsi kepuasan yang didapatkan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian IKU

Inspektorat Wilayah I telah berhasil mencapai target indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan intern pada tahun 2023 dengan capaian melebihi 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja terkait tingkat kepuasan penerima layanan atas kegiatan pengawasan yang diberikan Inspektorat Wilayah I TA 2023 didapatkan berkat upaya Inspektorat Wilayah I untuk terus memberikan pelayanan optimal dengan memberikan kualitas terbaik dan memperhatikan kode etik dan standar perilaku APIP.

Di tahun 2023, Inspektorat Wilayah I meningkatkan intensitas komunikasi dengan Satker/Unit Kerja, terutama pada kegiatan audit dan kegiatan evaluasi. Dengan dicabutnya status pandemi COVID-19, kegiatan audit dapat dilakukan dengan pertemuan fisik. Pertemuan fisik mempermudah tim audit dalam menangkap isu-isu yang ada dan memberikan rekomendasi yang lebih berkualitas. Selain itu, audit kinerja yang dilakukan Inspektorat Wilayah I juga



Gambar III. 2 Audit Kinerja Perwakilan RI di Tokyo, 6 s.d. 11 Juni 2023

melibatkan pegawai Satker/Unit Kerja yang diaudit selain pengelola keuangan, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pegawai lain terkait isu-isu yang ditemukan saat audit dan kedepannya dapat meningkatkan performa Satker/Unit Kerja tersebut.

Sejalan dengan perubahan ketentuan terkait Evaluasi AKIP, pada tahun 2023 Inspektorat Wilayah I juga meningkatkan koordinasi dengan Satker/Unit Kerja Kemenlu di Pusat dan Perwakilan RI dalam proses evaluasi AKIP melalui komunikasi informal dengan MKP maupun MKO/SMKO serta sesi klarifikasi dengan Satker/Unit Kerja yang dievaluasi. Meskipun masih dilakukan secara daring, komunikasi ini memudahkan MKP maupun MKO/SMKO memahami kriteria yang digunakan dalam evaluasi AKIP sehingga dapat melakukan perbaikan dengan tepat. MKP maupun MKO/SMKO juga lebih memahami penilaian yang dilakukan oleh tim evaluator sehingga kepuasan pengawasan meningkat.

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Wilayah I dalam rangka pencapaian IKU C1.1 antara lain:

- Kurangnya kesadaran dari penerima layanan pengawasan untuk mengisi survei;
- Kurangnya pemahaman responden dalam pengisian survei; dan
- Minimnya sesi komunikasi antara Inspektorat Wilayah I ke Satker/Unit Kerja pada pengawasan Reviu.

Upaya Perbaikan

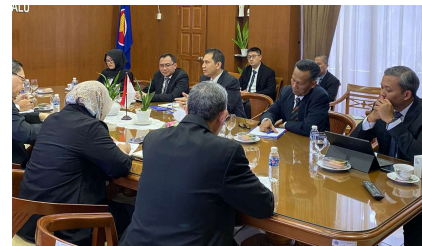
Dalam menghadapi kendala dan tantangan yang ada, Inspektorat Wilayah I telah melakukan upaya perbaikan antara lain sebagai berikut:

- Inspektorat Wilayah I telah secara aktif mengingatkan Satker/Unit Kerja baik pengelola keuangan maupun pegawai lain yang dilibatkan dalam pengawasan untuk mengisi survei persepsi kepuasan layanan setelah pengawasan dilakukan;
- Inspektorat Jenderal juga terus mengevaluasi survei yang ada agar menjadi lebih *user-friendly*; dan
- Inspektorat Wilayah I berusaha mengoptimalkan waktu yang ada dengan juga melakukan komunikasi secara informal kepada Satker/Unit Kerja dalam tiap pengawasan termasuk reviu.

Analisis Program Pendukung Capaian

Keberhasilan pencapaian target kinerja terkait Kepuasan Layanan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Wilayah I TA 2023, tidak terlepas dari kegiatan pelayanan pengawasan yang dilakukan antara lain:

- Audit Kinerja untuk 2 (satu) Satker Pusat yaitu Pusat Strategi dan Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data (Pusat SK IKAD) dan Direktorat Pasifik dan Oseania pada tanggal 21 Agustus s.d. 1 September 2023;
- Audit Kinerja untuk 2 (dua) Satker Perwakilan RI yaitu KBRI Tokyo pada tanggal 6 s.d. 11 Juli 2023 dan KJRI Kota Kinabalu pada tanggal 22 s.d. 28 Mei 2023;
- Kunjungan Kerja ke KBRI Phnom Penh pada tanggal 23 s.d. 27 Juni 2023 dan KJRI Kuching pada tanggal 5 s.d. 9 Oktober 2023;
- Reviu Laporan Keuangan TA 2022 dan Semester I TA 2023 untuk 40 (empat puluh) Satker Pusat dan Satker Perwakilan RI pada tanggal 13 s.d. 20 Februari 2023 dan 24 s.d. 30 Juli 2023;
- Reviu Rencana Kerja Anggaran TA 2024 untuk 40 (empat puluh) Satker Pusat dan Satker Perwakilan RI pada tanggal 11 s.d. 22 September 2023 (pagu anggaran) dan 9 s.d. 13 Oktober 2023 (alokasi anggaran);
- Reviu Revisi Anggaran untuk 32 (tiga puluh tujuh) Satker Perwakilan RI pada tanggal 31 Oktober s.d. 1 November 2023;
- Pemantauan Tindak Lanjut Temuan APIP dan Temuan BPK selama tahun berjalan;
- Pendampingan pada kegiatan rangkaian kegiatan KTT ASEAN yang dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di Labuan Bajo pada tanggal 6 s.d. 12 Mei 2023 dan di Jakarta pada tanggal 2 s.d. 5 September 2023;
- Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) TA 2022 untuk 57 (lima puluh tujuh) Satker Pusat dan Satker Perwakilan RI pada tanggal 12 April s.d. 31 Mei 2023;



Gambar III. 3 Audit Kinerja di Perwakilan RI di Kota Kinabalu, 22 s.d.28 Mei 2023



Gambar III. 4 Pendampingan KTT ASEAN di Jakarta, 2 s.d. 5 September 2023

- Verifikasi Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) Semester I dan Semester II TA 2023 untuk 37 (tiga puluh tujuh) Satker Perwakilan RI pada tanggal 2 s.d. 9 Juli 2023 dan pada tanggal 3 s.d. 10 Desember 2023; dan
- Verifikasi Kasus Hukuman Disiplin bagi Calon Penerima Gelar dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya dan Penghargaan Wredatama Tahun 2022 pada tanggal 15 s.d. 16 Mei 2023.



*Gambar III. 5 Evaluasi AKIP TA 2022,
12 April s.d. 31 Mei 2023*

Sebagai catatan, Inspektorat Wilayah I menjadi koordinator pada kegiatan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahunan TA 2022, Evaluasi AKIP dan Reviu Rencana Kerja Anggaran. Untuk peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I juga menjadi koordinator kegiatan telaah sejawat internal yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022. Telaah Sejawat Internal dilakukan dengan melibatkan seluruh Inspektorat Wilayah dan dilaksanakan berdasarkan pada Kepirjen Nomor SK/75034/B/PW/10/2019/67/11 tentang Pedoman

Penilaian Intern pada Inspektorat Jenderal. Telaah Sejawat Internal berfungsi untuk memastikan bahwa pengawasan telah sesuai dengan kode etik dan standar audit yang telah ditentukan oleh AAIPI.

Proyeksi Ke Depan

Berdasarkan target jangka menengah yang dituangkan di Renstra 2020-2024, pada tahun 2024, Inspektorat Wilayah I memiliki target IKU C1.1 Indeks Persepsi 3 (skala 4), hal ini telah tercapai pada tahun 2020-2023 sehingga Inspektorat Wilayah I akan berusaha mempertahankan bahkan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap kegiatan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Wilayah I.

Meskipun jumlah responden survei kepuasan Inspektorat Wilayah I lebih tinggi dibandingkan Inspektorat Wilayah lainnya, namun kualitas pengisian survei masih dirasa belum maksimal. Berdasarkan proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal di tahun 2023, maka Inspektorat Wilayah I ke depannya perlu terus melakukan upaya peningkatan kualitas hasil survei. Untuk tujuan tersebut, Inspektorat Wilayah I akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan Satker/Unit Kerja dalam pengisian survei sehingga hasil penilaian yang diterima dapat lebih berimbang dan relevan untuk semua jenis pengawasan.

Selain itu, untuk mencapai target indeks persepsi kepuasan layanan pengawasan di tahun mendatang, Inspektorat Wilayah I akan berusaha meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan dengan memperhatikan hasil dari Telaah Sejawat Internal untuk Inspektorat Wilayah I. Selain itu Inspektorat Wilayah I akan ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal secara keseluruhan, dengan turut berperan aktif dalam peningkatan nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM) bersama dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah lain.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Inspektorat Wilayah I telah berhasil melakukan efisiensi sumber daya untuk mencapai target IKU C1.1 yang ditunjukkan dengan capaian output yang melebihi target dengan realisasi anggaran yang optimal. Capaian output untuk kegiatan-kegiatan pendukung IKU C1.1 adalah sebesar 112,50%, sementara realisasi anggaran untuk IKU C1.1 adalah sebesar 100%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan-kegiatan *pop-up* yang harus dilaksanakan di luar rencana seperti kunjungan kerja dan asistensi pada rapat kegiatan Satker/Unit Kerja sehingga realisasi output melampaui rencana awal. Sementara itu, untuk realisasi anggaran dalam pencapaian IKU C1.1 telah dilakukan secara optimal dengan realisasi anggaran sebesar _____ dari pagu anggaran sebesar _____, atau mencapai _____. Sumber daya manusia yang digunakan untuk pencapaian IKU C1.1 juga telah dilakukan secara maksimal, meskipun pada triwulan IV terdapat mutasi SDM sebanyak 2 orang sehingga alokasi sumber daya yang ada hanya sebesar 95% dari perencanaan.



Sasaran Strategis B1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Efektif pada Kementerian Luar Negeri

Meliputi 1 (satu) IKU yaitu:

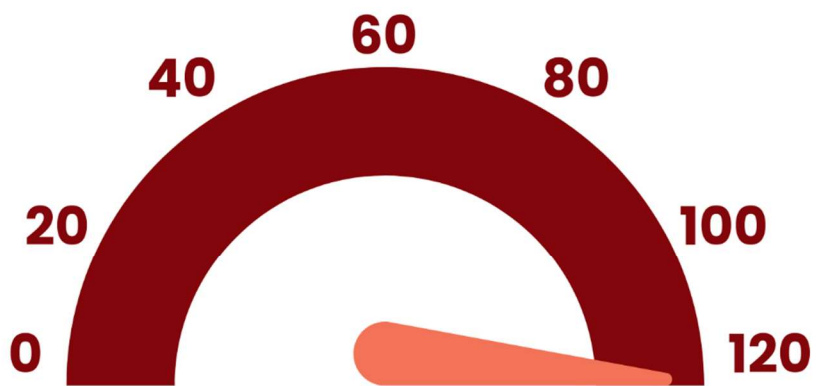
B1.1

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

IKU B1.1

Persentase **tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

Realisasi 85,31%
dari target 68%
Capaian: 125,45%*



*Batas toleransi capaian 120%

Target
TA 2022 TA 2023
55% -----> 68%

Peningkatan target tahunan IKU B1.1 yang ditetapkan sebagai wujud komitmen peningkatan AKIP di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI

Dari total

354 Rekomendasi

yang dihasilkan atas
Evaluasi AKIP TA 2022

sebanyak

302 Rekomendasi

telah ditindaklanjuti

85,31%

**IKU B1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Wilayah
Kerja Inspektorat Wilayah I**

Deskripsi IKU

Sesuai dengan Kepirjen No. 00651/B/PW/05/2023/67/11 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI, Inspektorat Wilayah I bersama dengan Inspektorat Wilayah lain dan Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi AKIP TA 2022 untuk seluruh Satuan Kerja di Kementerian Luar Negeri baik Eselon I, Eselon II maupun Perwakilan RI. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I atas Laporan Hasil Evaluasi.

Informasi Kinerja

Tabel III. 4 Perhitungan Capaian Kinerja IKU B1.1 Inspektorat Wilayah I TA 2023

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	Jumlah Rekomendasi AKIP yang ditindaklanjuti oleh unit organisasi, unit kerja dan perwakilan RI	302
	Total Rekomendasi AKIP yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan LHE TA 2022	354
Realisasi		85,31%
Target		68%
Capaian		125,45%
Batas Toleransi		120%

Pada tahun 2023, realisasi IKU B1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I adalah sebesar 85,31% dari target sebesar 68%. Dengan demikian, capaian untuk IKU B1.1 adalah sebesar 125,45% yang kemudian disesuaikan menjadi 120% sebagai batas maksimum toleransi capaian. Realisasi IKU ini didapatkan dari jumlah rekomendasi AKIP TA 2022 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 302 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 354 rekomendasi. Total rekomendasi didapatkan dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP sedangkan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti didapatkan dari laporan tindak lanjut hasil Evaluasi AKIP yang telah diterima Inspektorat Wilayah I dari Satker/Unit Kerja terkait.

Perbandingan Kinerja

Berdasarkan data rekapitulasi penyampaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Satker/Unit Kerja yang berada di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I, maka perbandingan kinerja untuk IKU B1.1 di tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel III. 5 Perbandingan Kinerja IKU B1.1 Inspektorat Wilayah I 2020-2023

IKU B1.1	2020	2021	2022	2023
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I (Realisasi)	55,70%	54,72% ▼	79,31% ▲	85,31% ▲
Target	50%	50% —	55% ▲	68% ▲
Capaian (Realisasi ÷ Target)	111,40%	109,44% ▼	144,20%* ▲	125,45%* ▼

* batas toleransi capaian maksimal 120%

Pada tabel di atas terlihat bahwa selama 4 tahun terakhir, Inspektorat Wilayah I selalu dapat mencapai target dari tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP. Pada tahun 2023, realisasi IKU B1.1 mengalami penurunan dari tahun 2022, hal ini disebabkan adanya peningkatan target dari 55% menjadi 68% sebagai wujud komitmen peningkatan AKIP di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI. Walaupun terdapat penurunan capaian, realisasi IKU B1.1 mengalami peningkatan dari 79,31% menjadi 85,31%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian IKU



Gambar III. 6 Klarifikasi Evaluasi AKIP TA 2022, 31 Mei 2023

Inspektorat Wilayah I telah berhasil mencapai target IKU B1.1 pada TA 2023. Keberhasilan ini didukung oleh komunikasi yang terus dijaga antara Inspektorat Wilayah I dan Satker/Unit Kerja di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP. Dalam kaitan ini, Inspektorat Wilayah I berusaha untuk meningkatkan intensitas komunikasi dengan terus mengingatkan Satker untuk dapat mengirimkan laporan tindak lanjut, baik secara informal maupun formal. Di samping itu, Inspektorat

Jenderal melalui koordinasi Sekretariat Inspektorat Jenderal juga mengirimkan Nota Dinas dan Berita Biasa untuk mengingatkan Satker/Unit Kerja terkait tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang dilakukan Itjen.

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Wilayah I dalam rangka pencapaian IKU B1.1 antara lain:

- Kurangnya kesadaran dari Satker/Unit Kerja Pusat dan Perwakilan RI untuk mengirimkan laporan tindak lanjut LHE atas Implementasi SAKIP;
- Adanya perubahan aturan terkait kriteria evaluasi AKIP sehingga banyak Satker/Unit Kerja maupun evaluator yang belum sepenuhnya memahami kriteria yang baru; dan
- Adanya keterbatasan waktu dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam melakukan evaluasi dan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Satker/Unit Kerja.

Upaya Perbaikan

Untuk menghadapi kendala dan tantangan yang ada, Inspektorat Wilayah I telah melakukan upaya perbaikan antara lain:

- Inspektorat Wilayah I telah berkomunikasi aktif dengan Satker/Unit Kerja dan mengingatkan pentingnya pengiriman laporan tindak lanjut terutama terkait dengan penilaian AKIP di tahun berikutnya. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga mengingatkan Satker/Unit Kerja secara formal melalui Nota Dinas dan Berita Biasa;
- Inspektorat Wilayah I sebagai koordinator evaluasi AKIP TA 2022 bekerjasama dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk mengadakan Bimbingan Teknis terkait evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan RB No 88 tahun 2021;
- Inspektorat Wilayah I sebagai koordinator evaluasi AKIP TA 2022 telah melakukan komunikasi terkait kriteria evaluasi AKIP yang baru pada pembukaan kegiatan klarifikasi hasil evaluasi AKIP;
- Untuk menghadapi keterbatasan waktu, monitoring tindak lanjut sementara dilakukan oleh SMKO. Diharapkan kedepannya, monitoring tindak lanjut dapat dilakukan oleh masing-masing *desk* berkoordinasi dengan tim tindak lanjut evaluasi AKIP.

Analisis Program Pendukung Capaian

Keberhasilan pencapaian target kinerja terkait tindak lanjut evaluasi AKIP TA 2022, tidak terlepas dari kegiatan evaluasi AKIP yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 15 April 2023 (Surat Tugas No. ST/PW/00398/04/2023/68/11 tanggal 5 April 2023) yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan pleno pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2023 (Surat Tugas No. ST/PW/00567/05/2023/68/11 tanggal 24 Mei 2023). Selain itu, Inspektorat Wilayah I bersama dengan Inspektorat Wilayah lainnya juga melakukan pendampingan Reviu Perjanjian Kinerja, Reviu Laporan Kinerja, *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja TW I, *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Sem I dan Pra *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Sem II yang diadakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai upaya peningkatan nilai AKIP Satker/Unit Kerja dan Kementerian Luar Negeri.

Hasil dari Evaluasi AKIP yang dilakukan Inspektorat Wilayah I adalah sebagai berikut:

Tabel III. 6 Hasil Evaluasi AKIP TA 2022

No	Satker/Unit Kerja	Nilai Evaluasi AKIP	
		2022	Kategori
	Pusat		
1.	Ditjen Aspasaf	80,10	A (Memuaskan)
2.	Sekretariat Ditjen Aspasaf	79,90	BB (Sangat Baik)
3.	Direktorat Afrika	79,15	BB (Sangat Baik)
4.	Direktorat Asselteng	79,05	BB (Sangat Baik)
5.	Direktorat Asia Tenggara	79,30	BB (Sangat Baik)
6.	Direktorat Astim (sebelumnya Astimpas)	79,40	BB (Sangat Baik)
7.	Direktorat Timteng	79,05	BB (Sangat Baik)
8.	Direktorat Pasifik dan Oseania	78,30	BB (Sangat Baik)
9.	Direktorat KSIA Aspasaf	79,30	BB (Sangat Baik)
10.	Ditjen KS ASEAN	80,25	A (Memuaskan)
11.	Sekretariat Ditjen KS ASEAN	79,15	BB (Sangat Baik)
12.	Direktorat KS Polkam ASEAN	79,15	BB (Sangat Baik)

No	Satker/Unit Kerja	Nilai Evaluasi AKIP	
		2022	Kategori
13.	Direktorat KS Ekonomi ASEAN	79,15	BB (Sangat Baik)
14.	Direktorat KS Sosbud ASEAN	78,40	BB (Sangat Baik)
15.	Direktorat KS Eksternal ASEAN	79,15	BB (Sangat Baik)
16.	BSKLN	79,70	BB (Sangat Baik)
17.	Sekretariat BSKLN	79,45	BB (Sangat Baik)
18.	Pusat SKK Aspasaf	79,55	BB (Sangat Baik)
19.	Pusat SKK Amerop	79,60	BB (Sangat Baik)
20.	Pusat SK Multilateral	79,40	BB (Sangat Baik)
21.	Pusat SK IKAD	79,35	BB (Sangat Baik)
Perwakilan RI			
1.	Astana (Nur Sultan)	77,05	BB (Sangat Baik)
2.	Baku	77,45	BB (Sangat Baik)
3.	Bandar Seri Begawan	77,25	BB (Sangat Baik)
4.	Bangkok	77,95	BB (Sangat Baik)
5.	Beijing	79,60	BB (Sangat Baik)
6.	Colombo	78,50	BB (Sangat Baik)
7.	Davao City	74,65	BB (Sangat Baik)
8.	Dhaka	73,75	BB (Sangat Baik)
9.	Dili	70,50	BB (Sangat Baik)
10.	Guangzhou	77,55	BB (Sangat Baik)
11.	Hanoi	77,30	BB (Sangat Baik)
12.	Ho Chi Minh City	77,50	BB (Sangat Baik)
13.	Hong Kong	75,10	BB (Sangat Baik)
14.	Islamabad	73,10	BB (Sangat Baik)
15.	Johor Bahru	78,30	BB (Sangat Baik)
16.		74,30	BB (Sangat Baik)
17.	Karachi	75,70	BB (Sangat Baik)
18.	Kota Kinabalu	76,30	BB (Sangat Baik)
19.	Kuala Lumpur	78,75	BB (Sangat Baik)
20.	Kuching	75,40	BB (Sangat Baik)
21.	Manila	78,60	BB (Sangat Baik)
22.	Mumbai	74,95	BB (Sangat Baik)
23.	New Delhi	78,15	BB (Sangat Baik)
24.	Osaka	75,55	BB (Sangat Baik)
25.	Penang	77,55	BB (Sangat Baik)
26.	Phnom Penh	78,35	BB (Sangat Baik)
27.	PTRI ASEAN	60,65	B (Baik)
28.	Pyong Yang	N/A	N/A
29.	Seoul	78,35	BB (Sangat Baik)
30.	Shanghai	42,75	C (Kurang)
31.	Singapura	78,40	BB (Sangat Baik)
32.	Songkhla	76,95	BB (Sangat Baik)
33.	Tashkent	78,30	BB (Sangat Baik)
34.	Tawau	76,40	BB (Sangat Baik)
35.	Tokyo	76,15	BB (Sangat Baik)
36.	Vientiane	76,90	BB (Sangat Baik)
37.	Yangon	64,80	B (Baik)

Evaluasi AKIP yang dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2022. Evaluasi AKIP juga mempertimbangkan perbaikan perencanaan dan pengukuran yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi di tahun tersebut lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja pada level Perwakilan RI dalam mendukung akuntabilitas kinerja Kementerian Luar Negeri.

Pada tahun 2022, Inspektorat Wilayah I tidak melakukan evaluasi AKIP untuk KBRI Pyongyang dikarenakan KBRI Pyongyang dalam status tidak beroperasi untuk sementara dan tidak memiliki perjanjian kinerja yang perlu dipertanggungjawabkan. Namun demikian, terdapat penambahan dua Satuan Kerja tingkat Eselon II baru di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I yaitu Pusat Strategi dan Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data (Pusat SK IKAD) di bawah BSKLN dan Direktorat Pasifik dan Oseania dibawah Ditjen Aspasaf yang dahulu merupakan bagian dari Direktorat Asia Timur dan Pasifik (sekarang berubah nama menjadi Direktorat Asia Timur).

Proyeksi Ke Depan

Berdasarkan target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra 2020-2024, pada tahun 2024, Inspektorat Wilayah I memiliki target IKU B1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP sebesar 60%. Mengingat realisasi IKU B1.1 dalam 2 tahun terakhir yang jauh melebihi target Renstra, maka untuk menjaga agar IKU tetap menantang, pada tahun 2024 akan dilakukan penyesuaian target IKU B1.1 melalui proses diskusi pembahasan internal Inspektorat Jenderal. Untuk mencapai target tersebut, Inspektorat Wilayah I akan berusaha meningkatkan komunikasi dengan Satker/Unit Kerja yang dievaluasi.

Sebagai bagian dari proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Inspektorat Wilayah I akan meningkatkan kualitas monitoring tindak lanjut rekomendasi AKIP yang dilakukan oleh unit organisasi, unit kerja dan perwakilan RI. Untuk itu, Inspektorat Wilayah I akan meningkatkan keterlibatan evaluator pemegang *desk* masing-masing Satker/Unit Kerja dalam memonitor dan mendampingi Unit Kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP. Hal ini juga akan membantu evaluator dalam menilai evaluasi internal yang dilakukan Satker/Unit Kerja sebagai salah satu kriteria penilaian AKIP di tahun selanjutnya. Inspektorat Jenderal juga berencana membentuk tim tindak lanjut AKIP yang akan mengoordinir pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di masing-masing Inspektorat Wilayah. Upaya ini diharapkan akan dapat meningkatkan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang turut berpengaruh pada nilai AKIP Satker/Unit Kerja maupun Kemenlu.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah I telah melakukan upaya pencapaian target IKU B1.1 dengan efisien, sebagaimana ditunjukkan dengan ketercapaian output dan realisasi anggaran yang optimal. Realisasi output pada kegiatan-kegiatan pendukung IKU B1.1 adalah sebesar 100% dari target, dengan realisasi anggaran mencapai _____ dari pagu anggaran sebesar _____, atau mencapai _____. Sumber daya manusia yang digunakan juga sesuai dengan perencanaan karena seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan pada triwulan III.

Sasaran Strategis B2 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Aset Negara serta Pencegahan Dini Terjadinya Risiko Permasalahan

Meliputi 3 (tiga) IKU yaitu:

B2.1

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

B2.2

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

B2.3

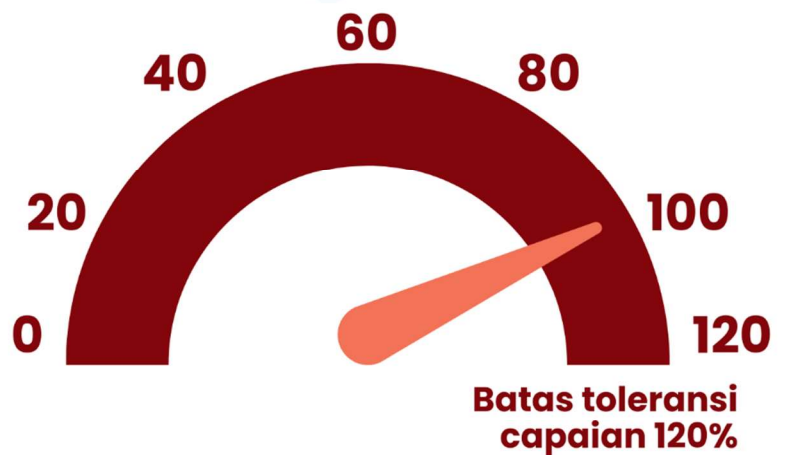
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

IKU B2.1

Persentase **tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan** pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I



**Realisasi 100%
dari target 100%
Capaian: 100%**



Dari tahun 2020, realisasi untuk IKU B2.1 adalah 100%. Secara jangka menengah berdasarkan Renstra 2020-2024, target tahun 2024 untuk IKU B2.1 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target tersebut telah tercapai dan telah merupakan target maksimal. Untuk tahun 2024, Inspektorat Wilayah I akan berusaha mempertahankan kinerja yang ada serta meningkatkannya.

Dari total

501 Rekomendasi

100%

yang dihasilkan atas reviu dokumen keuangan, seluruhnya telah ditindaklanjuti

IKU B2.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Dokumen Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I

Deskripsi IKU

IKU B2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I bertujuan untuk mengukur efektivitas kualitas rekomendasi atas reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I. Reviu dokumen keuangan terdiri dari Reviu atas Laporan Keuangan, Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L dan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Tindak Lanjut rekomendasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I atas rekomendasi yang diberikan pada dokumen keuangan.

Informasi Kinerja

Tabel III. 7 Perhitungan Capaian Kinerja IKU B2.1 Inspektorat Wilayah I TA 2023

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	501
	Total rekomendasi yang diberikan	501
Realisasi		100%
Target		100%
Capaian		100%

Pada tahun 2023, realisasi IKU B2.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%. Dengan demikian capaian untuk IKU B2.1 tersebut adalah sebesar 100%. Realisasi IKU ini didapatkan dari jumlah rekomendasi reviu dokumen keuangan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 501 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 501 rekomendasi. Total rekomendasi didapatkan dari Laporan Hasil Reviu sedangkan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti didapatkan dari data monitoring Inspektorat Wilayah I.

Perbandingan Kinerja

Dari hasil perhitungan data rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan yang diberikan dan ditindaklanjuti tersebut, maka perbandingan capaian IKU B2.1 pada tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel III. 8 Perbandingan Kinerja IKU B2.1 Inspektorat Wilayah I 2020-2023

IKU B2.1	2020	2021	2022	2023
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I (Realisasi)	100%	100% —	100% —	100% —
Target	100%	100% —	100% —	100% —
Capaian (Realisasi ÷ Target)	100%	100% —	100% —	100% —

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa dalam 4 tahun terakhir, Inspektorat Wilayah I telah menggunakan target maksimal 100% untuk IKU B2.1 dan telah memperoleh realisasi 100% pula. Hal ini menyebabkan tidak adanya perbedaan capaian di 4 tahun terakhir. Ke depannya diperlukan evaluasi terhadap IKU ini agar lebih menantang dan menggambarkan kinerja dari Inspektorat Wilayah I.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian IKU

Keberhasilan Inspektorat Wilayah I dalam mencapai target IKU B2.1 tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi aktif dengan Biro Keuangan, Biro Perencanaan Organisasi, dan Biro Umum dalam melaksanakan kegiatan reviu. Selain itu, koordinasi dengan Satker/Unit Kerja terkait juga sangat penting untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Inspektorat Wilayah I.

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dialami Inspektorat Wilayah I dalam rangka pencapaian IKU B2.1 antara lain:

- Pendokumentasian rekomendasi dan tindak lanjut yang belum maksimal;
- Kurangnya pemahaman Satker/Unit Kerja terhadap hasil rekomendasi yang diberikan; dan
- Keterbatasan waktu kegiatan reviu dokumen keuangan sehingga komunikasi dengan Satker/Unit Kerja terkait tindak lanjut hasil reviu juga sangat terbatas.



Gambar III. 7 Reviu Laporan Keuangan TA 2022, 13 s.d. 26 Februari 2023

Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, Inspektorat Wilayah I telah melakukan beberapa upaya perbaikan antara lain:

- Pendisposisian monitoring dan pendokumentasian rekomendasi serta tindak lanjut kepada SMKO;
- Melakukan koordinasi dengan Satker/Unit Kerja yang di reviu baik secara formal maupun informal;
- Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen keuangan sebelum dilakukan reviu.

Analisis Program Pendukung Capaian

Secara umum tujuan reviu dokumen keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan atas dokumen keuangan tersebut. Untuk itu, Inspektorat Wilayah I bersama dengan Inspektorat Wilayah lain telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- Reviu Laporan Keuangan TA 2022 pada tanggal 13 s.d. 26 Februari 2023;
- Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2023 pada tanggal 24 s.d. 30 Juli 2023;
- Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 pada tanggal 23 s.d. 31 Oktober 2023;
- Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tanggal 13 s.d. 20 Februari 2023;
- Reviu Rencana Kerja Anggaran TA 2023 Satker Pusat dan Satker Perwakilan RI pada tanggal 11 s.d. 22 September 2023 (pagu anggaran) dan pada tanggal 9 s.d. 13 Oktober 2023 (alokasi anggaran);
- Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Triwulan I pada tanggal 14 s.d. 18 Maret 2023;



Gambar III. 8 Reviu PIPK, 13 s.d. 20 Februari 2023



Gambar III. 9 Reviu RKA K/L (alokasi anggaran), 9 s.d. 13 Oktober 2023

- Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Triwulan II pada tanggal 9 s.d. 11 Juni 2023;
- Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Triwulan III pada tanggal 16 s.d. 19 September 2023;
- Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Triwulan IV pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2023;
- Telaah Berita Acara Pemeriksaan Kas pada tanggal 16 s.d. 20 Januari 2023 dan 20 s.d. 24 November 2023;
- Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 s.d. 24 November 2023; dan
- Reviu Revisi Anggaran Satker Pusat dan Satker Perwakilan RI pada tanggal 31 Oktober s.d. 1 November 2023.

Proyeksi Ke Depan

Dari tahun 2020, realisasi untuk IKU B2.1 adalah 100%. Secara jangka menengah berdasarkan Renstra 2020-2024, target tahun 2024 untuk IKU B2.1 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target tersebut telah tercapai dan telah merupakan target maksimal. Untuk tahun 2024, Inspektorat Wilayah I akan berusaha mempertahankan kinerja yang ada serta meningkatkannya.

Berdasarkan realisasi kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk IKU B2.1, Inspektorat Wilayah I bersama Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah lain berencana melakukan evaluasi ulang (revisit) IKU ini untuk menjadi IKU yang lebih menantang bagi Inspektorat Jenderal. Selain itu, diperlukan juga aturan yang jelas terkait monitoring tindak lanjut hasil reviu dokumen keuangan. Kerja sama dan komunikasi dengan Satker/Unit Kerja terkait juga perlu untuk ditingkatkan.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

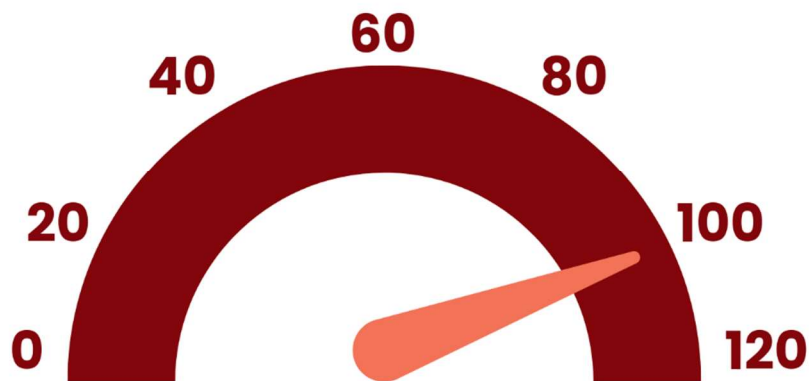
Inspektorat Wilayah I telah berhasil melakukan efisiensi sumber daya untuk mencapai target IKU B2.1 yang ditunjukkan dengan capaian output yang melebihi target dengan realisasi anggaran yang optimal. Capaian output untuk kegiatan-kegiatan pendukung IKU B2.1 adalah sebesar 118,66%, sementara realisasi anggaran untuk IKU B2.1 adalah sebesar 100%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan-kegiatan *pop-up* yang harus dilaksanakan di luar rencana seperti reviu tunggakan dan perubahan nilai alokasi anggaran RKA K/L dari pagu anggaran sehingga realisasi output melampaui rencana awal. Sementara itu, untuk realisasi anggaran dalam pencapaian IKU B2.1 telah dilakukan secara optimal dengan realisasi anggaran sebesar _____ dari pagu anggaran sebesar _____, atau mencapai _____. Sumber daya manusia yang digunakan untuk pencapaian IKU B2.1 juga telah dilakukan secara maksimal, meskipun pada triwulan IV terdapat mutasi SDM sebanyak 2 orang sehingga alokasi sumber daya yang ada hanya sebesar 95% dari perencanaan.



IKU B2.2

Persentase **tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP** pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

Realisasi 98,33%
dari target 95,50%
Capaian: 102,97%



***Batas toleransi capaian 120%**

IKU B2.2	2022	2023
Realisasi	98,34%	98,33% ▼
Target	95%	95,50% ▲
Capaian	103,51%	102,97% ▼

Realisasi maupun capaian IKU B2.2 di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan yang disebabkan adanya hasil audit 2023 yang baru terselesaikan di akhir tahun, sehingga menambah jumlah rekomendasi. Sementara itu, tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang ada belum dapat sepenuhnya dilakukan. Selain itu, penurunan capaian juga diakibatkan adanya peningkatan target IKU B2.2 dari sebelumnya 95% menjadi 95,50%.

Dari total

959 Rekomendasi

hasil temuan APIP

sebanyak

943 Rekomendasi

telah ditindaklanjuti

98,33%

**IKU B2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP
pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I**

Deskripsi IKU

IKU B2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Inspektorat Jenderal oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan Perwakilan RI di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah upaya penyelesaian atas rekomendasi hasil temuan APIP baik yang telah selesai maupun yang masih dalam proses penyelesaian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Data rekomendasi yang telah ditindaklanjuti merupakan hasil dari rekonsiliasi data tim tindak lanjut hasil audit APIP.

Informasi Kinerja

Tabel III. 9 Perhitungan Capaian Kinerja IKU B2.2 Inspektorat Wilayah I TA 2023

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	Jumlah Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	943
	Total Rekomendasi Hasil Temuan APIP	959
Realisasi		98,33%
Target		95,50%
Capaian		102,97%

Pada tahun 2023, realisasi IKU B2.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I adalah sebesar 98,33% dari target sebesar 95,50%. Dengan demikian capaian untuk IKU B2.2 tersebut adalah sebesar 102,97%. Realisasi IKU ini didapatkan dari jumlah rekomendasi hasil temuan APIP yang telah ditindaklanjuti sebanyak 943 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 959 rekomendasi. Jumlah rekomendasi hasil temuan APIP yang telah ditindaklanjuti terdiri dari 932 tindak lanjut yang sesuai dan 11 yang masih dalam proses. Total rekomendasi didapatkan dari Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal sedangkan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti didapatkan dari monitoring Inspektorat Wilayah I yang dikoordinasi oleh tim tindak lanjut hasil audit APIP.

Perhitungan tindak lanjut bersifat kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, terdapat tambahan 30 rekomendasi dari hasil audit Inspektorat Wilayah I yang dilaksanakan di tahun 2023. Dari 30 rekomendasi tersebut, 15 telah ditindaklanjuti dengan sesuai, 5 masih dalam proses penindaklanjutan dan 10 belum ditindaklanjuti. Selain itu, terdapat pula tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan untuk hasil-hasil audit tahun-tahun sebelumnya antara lain 11 rekomendasi dari tahun 2019, 3 rekomendasi dari tahun 2020 dan 16 rekomendasi dari tahun 2022.

Perbandingan Kinerja

Dari hasil perhitungan data rekomendasi hasil audit APIP dan tindak lanjutnya, maka perbandingan kinerja IKU B2.2 di tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel III. 10 Perbandingan Kinerja IKU B2.2 Inspektorat Wilayah I 2020-2023

IKU B2.2	2020	2021	2022	2023
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I (Realisasi)	93,17%	93,04% ▼	98,34% ▲	98,33% ▼
Target	75%	75% —	95% ▲	95,50% ▲
Capaian (Realisasi ÷ Target)	124,23%*	124,05%* ▼	103,51% ▼	102,97% ▼

* batas toleransi capaian maksimal 120%

Berdasarkan tabel perbandingan kinerja di atas dapat dilihat bahwa realisasi maupun capaian IKU B2.2 di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Hal ini disebabkan adanya hasil audit 2023 yang baru terselesaikan di akhir tahun, sehingga menambah jumlah rekomendasi. Sementara itu, tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang ada belum dapat sepenuhnya dilakukan. Selain itu, penurunan capaian juga diakibatkan adanya peningkatan target IKU B2.2 dari sebelumnya 95% menjadi 95,50%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian IKU

Inspektorat Wilayah I telah berhasil mencapai target kinerja IKU B2.2 di tahun 2023. Keberhasilan Inspektorat Wilayah I ini tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi aktif dengan Satker/Unit Kerja terkait. Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah I terus berusaha meningkatkan komunikasi dengan Satker/Unit Kerja terkait untuk dapat segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil audit Inspektorat Wilayah I terutama rekomendasi hasil audit yang telah lampau. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya pertemuan-pertemuan yang dilakukan Inspektorat Wilayah I dengan Satker/Unit Kerja terkait dan intensifnya kegiatan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang dilakukan Tim Inspektorat wilayah I.

Kendala dan Tantangan

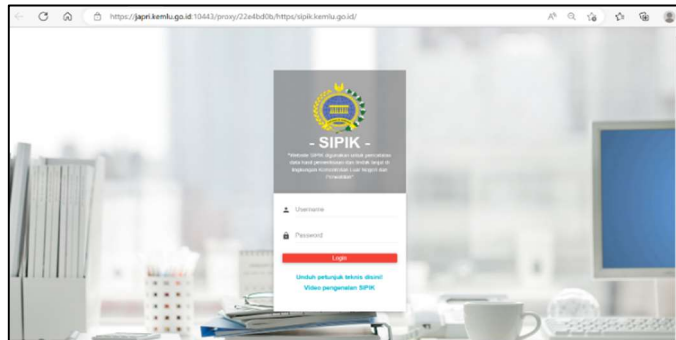
Kendala dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Wilayah I dalam rangka pencapaian target kinerja IKU B2.2 antara lain:

- Kurangnya kesadaran dan pemahaman Satker/Unit Kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit terutama hasil audit yang telah lampau;
- Kurangnya pemahaman Satker menggunakan aplikasi SIPIK untuk membantu monitoring tindak lanjut;
- Kurangnya *transfer of knowledge* antara pegawai lama ke pegawai baru di Satker/Unit Kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.

Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, Inspektorat Wilayah I telah melakukan beberapa upaya perbaikan di antaranya:

- berkoordinasi dan terus memonitor Satker/Unit Kerja untuk melakukan tindak lanjut;
- meningkatkan pertemuan-pertemuan dengan Satker/Unit Kerja yang masih memiliki *pending* isu terkait rekomendasi hasil audit di waktu lampau;
- mendorong dan menuntun Satker/Unit Kerja dalam memanfaatkan aplikasi SIPIK untuk memonitor dan melaporkan tindak lanjut; dan
- membantu dan memberikan arahan kepada Satker/Unit Kerja terkait rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti.



Gambar III. 10 Aplikasi SIPIK Inspektorat Jenderal

Analisis Program Pendukung Capaian

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pertemuan rekonsiliasi tindak lanjut hasil audit APIP yang dikoordinir oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan melibatkan Inspektorat Wilayah pada tanggal 3 s.d. 4 Oktober 2023. Untuk membantu mempercepat penyelesaian tindak lanjut, Inspektorat Wilayah I membentuk Tim Tindak Lanjut yang bertugas mengoordinasi monitoring tindak lanjut di Inspektorat Wilayah I dan menghadiri rekonsiliasi tindak lanjut yang diadakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Di samping itu, monitoring tindak lanjut juga dilakukan melalui aplikasi SIPIK dimana Satker/Unit Kerja dapat secara langsung menginput tindak lanjut rekomendasi audit.

Monitoring tindak lanjut Inspektorat Wilayah I dilakukan oleh para pemegang *desk* dari Satker/Unit Kerja terkait. Proses monitoring yang dilakukan pemegang *desk* dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan Satker/Unit Kerja atau melalui komunikasi formal (melalui Nota Dinas dan Berita Rahasia) maupun informal.

Proyeksi Ke Depan

Berdasarkan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, untuk IKU B2.2 targetnya adalah 80%. Melihat realisasi 4 tahun terakhir yang lebih tinggi dari target tersebut, maka target IKU B2.2 perlu direvisi pada Perjanjian Kinerja TA 2024. Dalam kaitan ini Inspektorat Wilayah I akan menetapkan target kinerja untuk IKU B2.2 yang lebih menantang dan realistis sejalan dengan proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, Inspektorat Wilayah I juga akan meningkatkan partisipasi dari pemegang *desk* dalam memonitor tindak lanjut hasil audit APIP dengan didukung upaya peningkatan pemahaman auditor, selain tim TL, terkait permasalahan yang ada di *desk* masing-masing.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

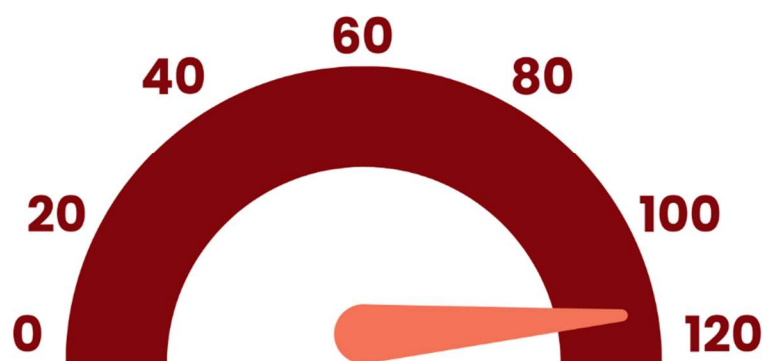
Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah I telah melakukan upaya pencapaian target IKU B2.2 dengan efisien, sebagaimana ditunjukkan dengan ketercapaian output dan realisasi anggaran yang optimal. Realisasi output pada kegiatan-kegiatan pendukung IKU B2.2 adalah sebesar 100% dari target, dengan realisasi anggaran mencapai _____ dari pagu anggaran sebesar _____, atau mencapai _____. Sumber daya manusia yang digunakan untuk pencapaian IKU B2.2 juga telah dilakukan secara maksimal, meskipun pada triwulan IV terdapat mutasi SDM sebanyak 2 orang sehingga alokasi sumber daya yang ada hanya sebesar 95% dari perencanaan.



IKU B2.3

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

Realisasi 99,47%
dari target 87,50%
Capaian: 113,68%



Batas toleransi
capaian 120%

IKU B2.2	2022	2023
Realisasi	82,06%	99,47% ▲
Target	87%	87,50% ▲
Capaian	94,32%	113,68% ▲

Inspektorat Wilayah I terus berusaha meningkatkan komunikasi dengan Satker/Unit Kerja terkait untuk dapat segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang ada. Inspektorat Wilayah I juga melakukan pendampingan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang masih pending.

Dari total

379 Rekomendasi

hasil Pemeriksaan BPK

87,50%

sebanyak

377 Rekomendasi

telah ditindaklanjuti

IKU B2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I

Deskripsi IKU

IKU B2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja, dan Perwakilan RI di Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah upaya penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK baik yang telah selesai maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Perhitungan tindak lanjut bersifat kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.

Informasi Kinerja

Tabel III. 11 Perhitungan Capaian Kinerja IKU B2.3 Inspektorat Wilayah I TA 2023

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	Jumlah Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	377
	Total Rekomendasi Hasil Temuan BPK	379
Realisasi		99,47%
Target		87,50%
Capaian		113,68%

Pada tahun 2023, realisasi IKU B2.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I adalah sebesar 99,47% dari target sebesar 87,50%. Dengan demikian capaian untuk IKU B2.3 adalah sebesar 113,68%. Realisasi IKU ini didapatkan dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sebanyak 377 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 379 rekomendasi. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti terdiri dari 337 tindak lanjut rekomendasi yang telah sesuai, 39 tindak lanjut rekomendasi yang belum sesuai, dan 1 tindak lanjut yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Total rekomendasi didapatkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Sementara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti didapatkan dari hasil rekonsiliasi tim tindak lanjut dengan BPK.

Perbandingan Kinerja

Dari hasil perhitungan data rekomendasi hasil temuan BPK dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, diperoleh perbandingan kinerja IKU B2.3 tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel III. 12 Perbandingan Kinerja IKU B2.3 Inspektorat Wilayah I 2020-2023

IKU B2.3	2020	2021	2022	2023
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I (Realisasi)	75,16%	76,32% ▲	82,06% ▲	99,47% ▲
Target	60%	65% ▲	87% ▲	87,50% ▲
Capaian (Realisasi ÷ Target)	125,27%*	117,42% ▼	94,32% ▼	113,68% ▲

* batas toleransi capaian maksimal 120%

Berdasarkan tabel perbandingan kinerja di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan realisasi maupun capaian kinerja dari IKU B2.3. Hal ini disebabkan bertambahnya tindak lanjut rekomendasi yang dalam proses di tahun 2023. Target untuk IKU B2.3 juga selalu mengalami peningkatan, hal ini dilakukan untuk terus memberikan tantangan terhadap pencapaian IKU B2.3 tersebut.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian IKU

Inspektorat Wilayah I telah berhasil mencapai target kinerja IKU B2.3 di tahun 2023. Keberhasilan Inspektorat Wilayah I ini tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi aktif dengan Satker/Unit Kerja terkait. Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah I terus berusaha untuk meningkatkan komunikasi dengan Satker/Unit Kerja terkait untuk dapat segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang ada. Inspektorat Wilayah I juga melakukan pendampingan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang masih *pending*.

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Wilayah I dalam rangka pencapaian target kinerja IKU B2.3 antara lain:

- Kurangnya kesadaran dan pemahaman Satker/Unit Kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
- Kurangnya *transfer of knowledge* antara pegawai lama ke pegawai baru terkait tindak lanjut; dan
- Terbatasnya waktu pembahasan dengan BPK terkait penyelesaian TL dan rekomendasi yang telah diberikan.

Upaya Perbaikan

Dalam mengatasi tantangan dan kendala yang ada, Inspektorat Wilayah I telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Secara aktif mengingatkan dan memberikan pendampingan kepada Satker/Unit Kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- Memperbanyak pembahasan terkait rekomendasi di luar jadwal dengan BPK.

Analisis Program Pendukung Capaian

Inspektorat Wilayah I telah mengikuti 2 (dua) kali kegiatan Rekonsiliasi Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK di tahun 2023, yaitu pada Semester I dan Semester II TA 2023. Selain itu, Inspektorat Wilayah I dan Sekretariat Inspektorat Jenderal serta Inspektorat Wilayah lainnya

juga aktif melakukan rekonsiliasi internal bulanan. Untuk membantu mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Wilayah I membentuk Tim Tindak Lanjut yang bertugas mengumpulkan data hasil pemeriksaan, memonitor dan melakukan rekonsiliasi data.



Gambar III. 11 Penyusunan Keparjian terkait Kriteria Audit Kinerja Diplomasi Ekonomi, 7 s.d. 9 Agustus 2023

Terkait dengan hasil pemeriksaan kinerja diplomasi ekonomi yang dilakukan BPK, Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah II diberikan tanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK Nomor 7 terkait Monitoring dan Evaluasi Pengawasan intern atas diplomasi ekonomi belum sepenuhnya optimal dalam mendukung penguatan diplomasi ekonomi. Dalam upaya menindaklanjuti temuan tersebut, Inspektorat Wilayah I telah menjadi koordinator penyusunan Keparjian Nomor

01317/B/PW/08/2023/67/11 tentang Kriteria Audit Kinerja Diplomasi Ekonomi di Perwakilan RI.

Proyeksi Ke Depan

Berdasarkan Renstra 2020-2024, target jangka menengah untuk IKU B2.3 di tahun 2024 adalah sebesar 65%. Melihat realisasi 4 tahun terakhir yang lebih tinggi dari target tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target IKU B2.3 pada Perjanjian Kinerja TA 2024, sesuai kondisi dan capaian kinerja terakhir.

Berdasarkan proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan terhadap tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK, Inspektorat Wilayah I akan meningkatkan partisipasi dari pemegang *desk* dalam penindaklanjutan hasil temuan BPK dengan didukung upaya peningkatan pemahaman auditor, selain tim TL, terkait permasalahan yang ada di *desk* masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan proses penyesuaian target kinerja untuk IKU B2.2 terkait tindak lanjut hasil audit APIP.

Terkait dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja diplomasi ekonomi, Inspektorat Wilayah I berencana untuk menyelesaikan penyusunan sub kriteria audit kinerja diplomasi ekonomi dan melakukan audit kinerja diplomasi ekonomi kembali di tahun 2024.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah I telah melakukan upaya pencapaian target IKU B2.3 dengan efisien, sebagaimana ditunjukkan dengan ketercapaian output dan realisasi anggaran yang optimal. Realisasi output pada kegiatan-kegiatan pendukung IKU B2.3 adalah sebesar 100% dari target, dengan realisasi anggaran mencapai _____ dari pagu anggaran sebesar _____, atau mencapai _____. Sumber daya manusia yang digunakan untuk pencapaian IKU B2.3 juga telah dilakukan secara maksimal, meskipun pada triwulan IV terdapat mutasi SDM sebanyak 2 orang sehingga alokasi sumber daya yang ada hanya sebesar 95% dari perencanaan.



Sasaran Strategis L1 **Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Inspektorat Wilayah I yang Baik**

Meliputi 1 (satu) IKU yaitu:

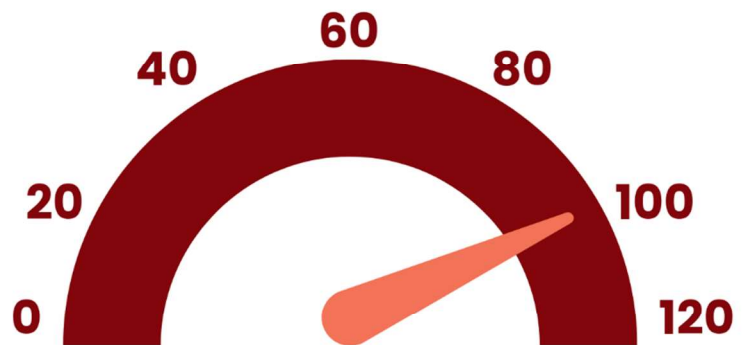
L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I



IKU L1.1

Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I

Realisasi 79,70 (BB)
dari target 79,50 (BB)
Capaian: 100,25%



IKU B2.2	2022	2023
Realisasi	78,15 (BB)	79,70 (BB)
Target	79,50 (BB)	79,50 (BB)
Capaian	98,30%	100,25%

*nilai tidak dapat diperbandingkan

Inspektorat Wilayah I telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP TA 2022 serta meningkatkan evaluasi internal di lingkungan Inspektorat Wilayah I dengan melakukan dialog kinerja yang melibatkan pimpinan dan staff

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30%	23,10
Pengukuran Kinerja	30%	24,60
Pelaporan Kinerja	15%	12,75
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,25
Nilai : 79,70% (BB) Sangat Baik		

IKU L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I

Deskripsi IKU

Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian AKIP meliputi empat komponen, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Wilayah I telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Penilaian AKIP dilakukan oleh tim evaluator dari Inspektorat Wilayah III sebagai pemegang *desk* Inspektorat Jenderal.

Informasi Kinerja

Tabel III. 13 Perhitungan Capaian Kinerja IKU L1.1 Inspektorat Wilayah I TA 2023

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I (Berdasarkan LHE)	79,70 (BB)
Realisasi		79,70 (BB)
Target		79,50 (BB)
Capaian		100,25%

Pada tahun 2023, realisasi IKU L1.1 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I adalah sebesar 79,70 dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target IKU L1.1 sebesar 79,50, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 100,25%.

Nilai ini didapatkan berdasarkan Nota Dinas Inspektur Wilayah III No. 28796/PW/07/2023/70 tanggal 12 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Inspektorat Wilayah I, rincian Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I adalah sebagai berikut:

Tabel III. 14 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I TA 2022

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
A	Perencanaan Kinerja	30%	23,10
B	Pengukuran Kinerja	30%	24,60
C	Pelaporan Kinerja	15%	12,75
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,25
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		100%	79,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Perbandingan Kinerja

Dasar kriteria penilaian AKIP untuk tahun 2022 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sehingga nilai capaian tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan. Namun demikian, sebagai

informasi berikut kami sajikan data nilai implementasi SAKIP (2020-2022) dan nilai AKIP (2023) Inspektorat Wilayah I:

Tabel III. 15 Perbandingan Kinerja IKU L1.1 Inspektorat Wilayah I 2020-2023

IKU L1.1	2020	2021	2022	2023*
Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I tahun sebelumnya (Realisasi)	77,19 (BB)	77,51 (BB) ▲	78,15 (BB) ▲	79,70 (BB)
Target	78 (BB)	79 (BB) ▲	79,5 (BB) ▲	79,5 (BB)
Capaian (Realisasi ÷ Target)	98,96%	98,11% ▼	98,30% ▲	100,25%

*tidak dapat diperbandingkan

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian IKU

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020-2022, Inspektorat Wilayah I belum dapat mencapai target IKU L1.1 nilai AKIP. Namun pada tahun 2023 Inspektorat Wilayah I berhasil mencapai target IKU L1.1 tersebut. Keberhasilan pencapaian target kinerja IKU L1.1 disebabkan oleh komunikasi yang baik antara Inspektorat Wilayah I dengan tim evaluator. Komunikasi tersebut diantaranya dengan menindaklanjuti rekomendasi penilaian AKIP TA 2021 yaitu:

- Menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan menampilkan infografis yang menarik serta mendukung informasi capaian kinerja;
- Mengkaji penerapan *Reward and Punishment* dalam hal pencapaian target kinerja dalam perjanjian kinerja di lingkungan Inspektorat Wilayah I; dan
- Agar memperhatikan penetapan target IKU sehingga capaiannya tidak melebihi 120%.

Tindak lanjut tersebut telah disampaikan secara formal kepada Inspektorat Wilayah III di tahun sebelumnya melalui Nota Dinas Plt. Inspektur Wilayah I No. 39561/PW/11/2022/68 tanggal 11 November 2022.

Selain itu, Inspektorat Wilayah I juga meningkatkan evaluasi internal di lingkungan Inspektorat Wilayah I dengan melakukan dialog kinerja yang melibatkan pimpinan dan staff. Inspektorat Wilayah I juga meningkatkan koordinasi dengan BPO terkait dengan penggunaan aplikasi e-kinerja dan pelaporan kinerja lainnya.

Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah juga telah mengirimkan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP TA 2022 kepada Inspektorat Wilayah III melalui Nota Dinas Inspektur Wilayah I No. 44051/PW/10/2023/68 tanggal 18 Oktober 2023.

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Wilayah I dalam rangka pencapaian target kinerja IKU L1.1 antara lain:

- Keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen kinerja mengingat banyaknya kegiatan pengawasan yang perlu dilakukan;
- Masih kurangnya partisipasi seluruh pegawai dalam pengelolaan kinerja Inspektorat Wilayah I;

- Belum adanya konsep pohon kinerja yang jelas untuk digunakan dalam pengelolaan kinerja; dan
- Adanya capaian IKU yang cenderung melebihi batas toleransi 120%.

Upaya Perbaikan

Dalam mengatasi kendala dan tantangan yang ada, Inspektorat Wilayah I telah melakukan upaya-upaya perbaikan, antara lain:

- Mengoptimalkan waktu yang ada untuk menyusun dokumen kinerja yang diperlukan;
- Meningkatkan partisipasi seluruh pegawai dalam pembahasan kinerja termasuk SKP dalam setiap rapat staff dan dialog kinerja tingkat Eselon II maupun Eselon I;
- Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan BPO dalam penyusunan perjenjangan kinerja dan pohon kinerja; dan
- Berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah lain untuk mengevaluasi target IKU dengan capaian melebihi 120%.

Analisis Program dan Kegiatan

Inspektorat Wilayah I dengan dikoordinir oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen AKIP mulai dari Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Manual IKU, dan Laporan Kinerja untuk Tahun 2023. Inspektorat Wilayah I juga secara berkala telah melaporkan kinerjanya melalui aplikasi AKSI setiap triwulanan. Selain itu, Inspektorat Wilayah I juga telah menjalankan evaluasi internal dengan mengadakan rapat secara berkala dan mengikuti Dialog Kinerja Inspektorat Jenderal pada tanggal 7 September 2023 dan 1 Desember 2023.



Gambar III. 12 Wawancara Telaah Sejawat Internal ke Inspektorat Wilayah II, 15 Desember 2023

Dalam rangka penjaminan dan pengembangan kualitas kinerja pengawasan, Inspektorat Wilayah I juga menjadi koordinator pelaksanaan telaah sejawat internal. Telaah sejawat internal telah lama tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan baru mulai dihidupkan kembali pada tahun 2023. Telaah sejawat internal dilakukan untuk menilai dan mendorong APIP untuk mencapai kesesuaian kegiatan pengawasan intern, kode etik dan standar, serta untuk mempercepat peningkatan kapabilitas APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern. Pada tahun 2023, hasil telaah sejawat pengawasan Inspektorat Wilayah I mendapatkan nilai 78,15% dengan kategori cukup. Hal ini disampaikan dalam Nota Dinas Inspektur Wilayah IV Nomor 55677/PW/12/2023/71 tanggal 28 Desember 2023.

Proyeksi Ke Depan

Berdasarkan Renstra 2020-2024, target jangka menengah untuk IKU L1.1 di tahun 2024 adalah sebesar 82 (A). Mengingat realisasi IKU L1.1 selama 4 tahun terakhir yang berada pada angka 77-79 (BB), maka target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 82 tersebut akan

sulit dicapai. Oleh karenanya, berdasarkan proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas capaian IKU L1.1 selama 4 tahun terakhir, maka pada Perjanjian Kinerja TA 2024 akan dilakukan penyesuaian target yang lebih realistis.

Mengingat realisasi kinerja untuk IKU L1.1 di tahun 2023 telah melebihi target, maka pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 akan dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan realisasi dan proyeksi kinerja pada IKU L1.1. Hal ini dilakukan untuk menjaga bahwa IKU tetap menantang dan sekaligus sebagai komitmen peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah I secara berkelanjutan.

Pada TA 2024, Inspektorat Wilayah I akan terus berkoordinasi dengan BPO dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam merampungkan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja. Selain itu, Inspektorat Wilayah I juga akan berpartisipasi dalam persiapan penyusunan Renstra 2025-2029. Inspektorat Wilayah I juga akan terus meningkatkan partisipasi seluruh pegawai dan pimpinan dalam pengelolaan kinerja.

Terkait dengan telaah sejawat internal, Inspektorat Wilayah I akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Inspektorat Wilayah IV pada tahun 2024. Diharapkan kedepannya nilai telaah sejawat Inspektorat Wilayah I akan terus meningkat dan mendukung nilai kapabilitas APIP (IACM) Kementerian Luar Negeri.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah I telah melakukan upaya pencapaian target IKU L1.1 dengan efisien, sebagaimana ditunjukkan dengan ketercapaian output dan realisasi anggaran yang optimal. Realisasi output pada kegiatan-kegiatan pendukung IKU L1.1 adalah sebesar 100% dari target, dengan realisasi anggaran mencapai dari pagu anggaran sebesar , atau mencapai . Sumber daya manusia yang digunakan untuk pencapaian IKU L1.1 juga telah dilakukan secara maksimal, meskipun pada triwulan IV terdapat mutasi SDM sebanyak 2 orang sehingga alokasi sumber daya yang ada hanya sebesar 95% dari perencanaan.

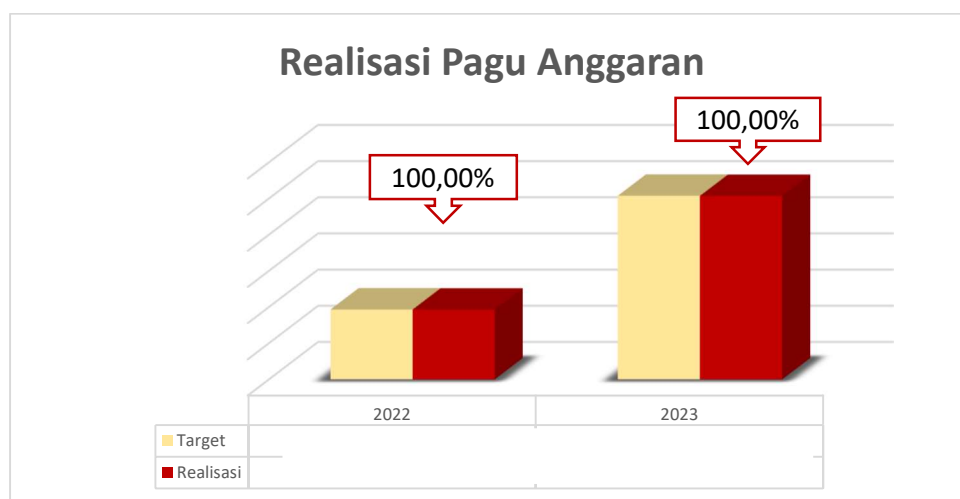
III.2. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung kinerja Inspektorat Wilayah I, pada tahun 2023 Inspektorat Wilayah I mendapatkan pagu anggaran awal sebesar . Namun dengan berbagai kebutuhan yang ada, Inspektorat Wilayah mendapatkan tambahan anggaran di tahun berjalan sehingga pagu anggaran akhir adalah sebesar . Dari total pagu yang ada, realisasi anggaran di tahun 2023 adalah sebesar atau mencapai dengan detail sebagai berikut:

Tabel III. 16 Realisasi Pagu Anggaran TA 2023

No	Komponen	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	%
1	Audit				
2	Reviu				
3	Pemantauan				
4	Asistensi, Fasilitas dan Pelatihan				
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya				
6	Evaluasi				
TOTAL					

Pada tahun 2022 maupun 2023, realisasi anggaran Inspektorat Wilayah I adalah 100%. Hal ini merupakan hasil dari upaya Inspektorat Wilayah I untuk terus mengoptimalkan pagu anggaran yang diberikan. Alokasi anggaran bagi Inspektorat Wilayah I sampai sekarang masih dirasa kurang memadai, mengingat banyaknya pengawasan yang perlu dilakukan. Inspektorat Wilayah I melihat bahwa pengawasan terutama audit perlu ditingkatkan intensitasnya serta jumlah objeknya. Hal itu didasari oleh meningkatnya kasus, laporan dan temuan BPK terutama di Perwakilan RI.



Gambar III. 13 Diagram Perbandingan Realisasi Pagu Anggaran 2022 dan 2023

III.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Wilayah I dicapai untuk mendukung pelaksanaan program dukungan manajemen dengan Kegiatan Rincian Output Layanan Manajemen Kinerja Internal dan Rincian Output Layanan Audit Internal Wilayah I dengan metode pengelolaan kinerja berbasis anggaran. Secara umum, nilai capaian kinerja Inspektorat Wilayah I adalah 107,51 yang berarti meningkat 4,09 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 103,42. Pengelolaan kinerja berbasis anggaran Inspektorat Wilayah I juga telah mendukung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 yaitu sebesar 94,84. Data efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat Wilayah I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 17 Data Output dan Anggaran Inspektorat Wilayah I TA 2023

No	Komponen	Output		%	Anggaran		%
		Target	Realisasi		Alokasi	Realisasi	
1	Audit						
2	Reviu						
3	Pemantauan						
4	Asistensi, Fasilitas dan Pelatihan						
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya						
6	Evaluasi						
TOTAL							

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran Inspektorat Wilayah I TA 2023 hampir sepenuhnya terealisasi (realisasi dan tersisa) dengan ketercapaian output melebihi 100%. Output yang lebih dari target tersebut disebabkan adanya kegiatan-kegiatan *pop-up* yang sebagian dilakukan melalui daring atau dengan pembiayaan dari Satker yang mengajukan permohonan pengawasan. Kegiatan itu antara lain seperti pendampingan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran, kunjungan kerja ke Perwakilan, pemeriksaan pembukuan, reviu tunggakan, dan rapat-rapat yang memerlukan asistensi dari Inspektorat Wilayah I.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023, jumlah staff di Inspektorat Wilayah I masih sangat jauh dari formasi yang ditentukan pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel III. 18 Formasi dan *Bezetting* Pegawai Inspektorat Wilayah I

Jabatan	Formasi	Bezetting	Persentase Pemenuhan
Inspektur Wilayah I	1	1	100%
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	100%
Auditor Madya	4	3	75%
Auditor Muda	12	2	16,67%
Auditor Pertama	36	7	19,44%
Auditor Penyelia	1	-	0%
Auditor Mahir	1	-	0%
Penata Kanselerai Pertama	1	-	0%
Sekretaris (PPNP)	1	1	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengisian formasi auditor muda dan auditor pertama masih di bawah 20%. Selain itu, belum terdapat pengisian formasi auditor penyelia, auditor mahir maupun penata kanselerai pertama. Pada akhir tahun 2023, Inspektorat Wilayah I dengan berat hati juga harus melepaskan 1 auditor madya yang meninggal dunia dan 1 auditor muda yang dimutasi untuk penugasan SK 111 ke KBRI Ankara.

Mengingat sumber daya manusia yang terbatas dan meningkatnya kebutuhan pengawasan yang harus dilakukan, Inspektorat Wilayah I telah berusaha untuk mengatur pembagian pegawai untuk masing-masing kegiatan dengan menentukan tim di masing-masing kegiatan pada awal tahun. Inspektorat Wilayah I juga membuat prioritas kegiatan pengawasan sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan dengan lebih efektif. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa usia auditor madya dan auditor muda yang ada saat ini telah lebih dari 50 tahun sehingga diperlukan adanya regenerasi segera dengan perekrutan auditor-auditor baru.

Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Inspektorat Wilayah I tidak memiliki anggaran untuk melakukan pengadaan barang modal di tahun 2023. Untuk mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan, Inspektorat Wilayah I berkoordinasi dengan pejabat pengadaan Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Biro Umum. Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah I mendapatkan tambahan tiga buah laptop yang dialokasikan untuk auditor pertama. Laptop sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas auditor, khususnya untuk pemeriksaan lapangan terhadap Satker/Unit Kerja terkait. Sampai dengan akhir 2023, masih terdapat dua auditor yang belum mendapatkan fasilitas laptop dari kantor. Diharapkan kedepannya akan terdapat pengadaan laptop yang dapat dialokasikan kepada auditor-auditor tersebut.



Bab IV

Penutup

IV.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Wilayah I tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Wilayah I yang dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran Strategis (SS), dan program serta kegiatan, pencapaian kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2023 menunjukkan hasil dengan kategori Istimewa. Dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) IKU, target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 seluruhnya telah terealisasi sesuai target, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Inspektorat Wilayah I TA 2023 sebesar 107,51, atau mengalami kenaikan sebesar 4,09 poin dari tahun sebelumnya yang NCKO di tahun tersebut (2022) tercatat sebesar 103,42.

Pada tahun 2023, terdapat peningkatan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Wilayah I. Beberapa pengawasan juga mulai dilaksanakan dengan pertemuan fisik. Selain itu, Inspektorat Wilayah I juga aktif dalam peningkatan kualitas pengawasan yang dilakukan dengan menjadi koordinator telaah sejawat internal. Selain itu, Inspektorat Wilayah I juga berpartisipasi aktif dalam pendampingan penilaian IACM yang dilakukan BPKP.

IV.2. Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Wilayah I antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Wilayah I. Pada 31 Desember 2023, Inspektorat Wilayah I memiliki 2 auditor madya, 1 auditor muda, 7 auditor pertama, 1 Kasubag TU dan 1 Sekretaris sedangkan wilayah kerja Inspektorat Wilayah I meliputi 3 Satker Pusat dan 37 Satker Perwakilan RI dan formasi yang dibutuhkan sebanyak 57 pegawai.
- Terdapat kegiatan-kegiatan pengawasan yang harus dijalankan dalam waktu yang bersamaan (saling tumpang tindih);

- Keterbatasan alokasi anggaran dimana Inspektorat Wilayah I memiliki banyak kegiatan pengawasan yang perlu ditingkatkan intensitasnya dan jumlahnya, seperti pendampingan DIPA maupun jumlah objek audit. Akan alokasi anggaran yang ada belum memadai bagi Inspektorat Wilayah I untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut secara maksimal.
- Terus bertambahnya lingkup pengawasan yang perlu dilakukan Inspektorat Jenderal mengakibatkan kegiatan yang ada juga terus bertambah sedangkan terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan waktu sehingga setiap auditor memiliki beban kerja yang tinggi.

IV.3. Proyeksi Ke Depan

Pada tahun 2024, Inspektorat Wilayah I akan menjadi koordinator pada kegiatan penyusunan PIBR dan reviu RKBMN. Sehubungan dengan penyusunan PIBR, Inspektorat Jenderal melihat adanya kebutuhan evaluasi dan revisi Kepirjen yang ada yaitu Kepirjen Nomor SK/75143/B/PW/12/2019/67/11 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Hal ini perlu dilakukan untuk memutakhirkan kriteria yang saat ini dirasa belum dapat menangkap risiko-risiko yang perlu diperhatikan dalam pemilihan objek pengawasan.

Inspektorat Wilayah I akan berusaha meningkatkan partisipasi dari seluruh pegawai dalam mencapai kinerja Inspektorat Wilayah I. Hal ini dilakukan dengan penajaman IKI pada Sasaran Kinerja Pegawai TA 2024. Inspektorat Wilayah I juga akan berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Jenderal melalui Telaah sejawat Internal maupun upaya-upaya peningkatan nilai IACM.



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA